

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberhasilan proses pendidikan tidak dapat dilepaskan dari keberadaan guru. Guru merupakan pelaku utama di sekolah-sekolah formal. Menurut Utomo (2012) pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan profesionalisme guru diantaranya meningkatkan kualifikasi dan persyaratan jenjang pendidikan yang lebih tinggi bagi tenaga pengajar mulai tingkat persekolahan sampai perguruan tinggi, di samping itu diadakan penyetaraan kualifikasi pendidikan bagi para guru, upaya lain yang dilakukan pemerintah adalah dengan melaksanakan program sertifikasi.

Diharapkan oleh pemerintah pasca sertifikasi setidaknya ada tiga tujuan yang dapat dicapai yaitu untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas pendidikan. *Pertama*, penilaian kinerja guru yang telah mengikuti sertifikasi, *kedua* peningkatan kompetensi berkelanjutan, dan *ketiga* pemberdayaan kelompok kerja guru (KKG) atau musyawarah guru mata pelajaran (MGMP).

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan setelah meloloskan tunjangan profesi bagi guru melalui uji sertifikasi, menuntut kewajiban atau kinerja guru menjadi lebih baik dari pada sebelum mendapat tunjangan profesi. Pemerintah ingin menyejahterahkan guru sekaligus meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru yang bermuara pada kualitas pendidikan. Di sisi lain, mayoritas guru hanya berorientasi pada aspek kesejahteraan yaitu bertujuan mencari tambahan penghasilan melalui sertifikasi. Sementara itu, guru mempunyai makna tersendiri terhadap

program sertifikasi guru. Pemaknaan atas sesuatu (obyek di luar dirinya) yang berupa simbol-simbol yang ditemuinya disebut *self-indication*. Proses ini adalah proses interaksi pada diri pribadi individu yang bermula dari mengetahui (sesuatu), lalu menilainya, baru memberikan makna dan mengambil sikap atau tindakan yang merujuk dari pemaknaan tadi (Blumer, 2004). Pemaknaan guru terhadap sertifikasi dan diharapkan dapat memberi pengaruh terhadap profesionalisme kependidikannya, yakni dalam mengambil sikap atau tindakan sebagai individu yang profesional.

Sertifikasi guru tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kompetensi guru. Kegiatan ini sebenarnya bertujuan guna meningkatkan kualifikasi guru, tetapi kenyataannya belum sesuai harapan, kualifikasi tenaga kependidikan yang telah mengikuti program sertifikasi belum memperlihatkan kualifikasi yang signifikan (Kompas, 13 November 2009). Dikemukakan oleh Baedhowi tentang program sertifikasi ini, bahwa temuan penelitiannya mengidentifikasi motivasi tenaga kependidikan yang mengikuti program sertifikasi pada dasarnya terkait dengan finansial, yaitu dengan harapan memperoleh TPP. Penemuan yang sama ditemukan oleh Dirjen PMPTK Depdiknas (2008) di Propinsi Sumbar, Jatim, Jateng, Sulsel dan NTB. Hasil penelitiannya mengidentifikasi, bahwa para guru mempunyai argumentasi bervariasi, pada dasarnya yang mendorong para guru ikut program ini karena kebutuhan dana. Pada hakekatnya, sertifikasi bertujuan guna meningkatkan kualifikasi tenaga kependidikan nampaknya masih direspon hanya dalam tataran wacana (Kompas, 13 November 2009).

Sertifikasi guru sebagai upaya meningkatkan kompetensi profesional pendidik. Walaupun setelah lolos uji sertifikasi, belum semua guru mempunyai

kualifikasi yang diharapkan. Fenomena di lapangan masih banyak guru yang pulang kerja jam 13.00 dan kalau hari Jum'at jam 11.00 sekolah sudah tampak sepi. Dengan demikian, guru belum memenuhi 37,5 jam kewajiban bagi yang telah tersertifikasi. Kadangkala sudah jam 07.00, guru masih dalam perjalanan ke sekolah.

Guru dituntut melaksanakan tugas secara profesional. Guru profesional memiliki pengetahuan dan kemampuan yang meliputi 10 kompetensi, yaitu mengembangkan kepribadian, menguasai landasan kependidikan, menguasai bahan pengajaran, menyusun program pengajaran, melaksanakan program pengajaran, menilai hasil dan proses belajar mengajar, menyelenggarakan program bimbingan, menyelenggarakan administrasi sekolah, kerjasama dengan sejawat dan masyarakat, dan menyelenggarakan penelitian sederhana untuk keperluan pengajaran (Danim, 2002).

Istilah profesional secara umum yaitu bagi siapa yang memperoleh gaji atau upah dari suatu pekerjaannya, yang dikerjakan secara baik dan sempurna atau tidak dalam hal ini yang dimaksud adalah guru. Profesional suatu pekerjaan ditunjang dengan ilmu yang sesuai dan hanya bisa didapat dari lembaga pendidikan. Keahlian yang dimilikinya menjadi dasar dalam mempertanggungjawabkan kinerjanya secara ilmiah. Kompetensi khusus seorang guru tidak dimiliki oleh orang selain guru "*a teacher is person charged with the responsibility of helping others to learn and to behave in new different ways*" (Cooper, 1990).

Profesionalisme seorang guru dipertaruhkan dalam menghadapi tuntutan pembelajaran yang demokratis pada saat ini, dan menjadi umpan balik yang merupakan refleksi pemenuhan kompleksitas kebutuhan siswa, yang meliputi

kemampuan menguasai pelajaran dan kemampuan lain termasuk kemampuan psikis, strategis, serta produktif. Guru yang profesional itulah yang bisa menjawab tuntutan itu.

Kriteria positif harus dimiliki oleh guru yang profesional. Terdapat tujuh kriteria guru yang wajib dipenuhi sebagai guru yang baik dan ideal menurut Gilbert H. Hunt (1999), yaitu (1) bersifat positif dalam pembimbingan terhadap siswa, (2) memiliki pengetahuan yang memadai tentang materi pembelajaran yang diampu, (3) memiliki kemampuan penyampaian materi pembelajaran, (4) memiliki kemampuan menggunakan metodologi pembelajaran, (5) mampu mengelola manajemen kelas, (6) mampu memberikan harapan riil terhadap siswa, dan (7) mampu merelasi kebutuhan siswa.

Guru sebagai profesi memiliki aturan profesi keguruan yang diberlakukan, agar terjadi keseimbangan antara hak dan kewajiban terhadap seseorang yang memiliki berprofesi sebagai guru. Di Indonesia diperlukan guru yang tidak saja disebut sebagai guru, tetapi diperlukan seorang guru profesional terhadap profesinya sebagai guru. Aturan profesi keguruan berasal dari dua kata dasar yakni profesi dan bidang spesifik guru/keguruan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, profesionalisme merupakan sifat-sifat (kemampuan, kemahiran, cara pelaksanaan sesuatu dan lain-lain) sebagaimana yang sewajarnya terdapat pada seorang profesional. Profesionalisme berasal dari kata *profession* yang bermakna berhubungan dengan profesi dan memerlukan kepandaian khusus dalam menjalankannya (KBBI, 1994). Profesionalisme adalah tingkah laku, kepakaran atau kualitas dari seseorang yang profesional. Jadi profesionalisme guru

merupakan kemampuan guru untuk melakukan tugas pokoknya sebagai pendidik dan pengajar .

Guru sebagai profesi juga seyogyanya profesional, yang berarti pekerjaan yang dilakukan seseorang sebagai sumber penghasilan dalam kehidupan dengan keahlian khusus, kemahiran tertentu, atau kecakapan khusus yang terstandar sesuai mutu atau norma tertentu serta diperlukan pendidikan profesi untuk keahlian tersebut.

Menurut Utomo (2012) upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan profesionalisme guru antara lain: (1) meningkatkan kualifikasi serta persyaratan jenjang pendidikan yang lebih tinggi, untuk tenaga pengajar mulai dari jenjang persekolahan sampai dengan tingkat perguruan tinggi, dan (2) program penyetaraan Diploma II bagi guru-guru SD, Diploma III bagi guru-guru SLTP dan Strata I (Sarjana) bagi guru-guru SLTA. Tetapi program penyetaraan ini tidak memiliki arti lebih banyak, apabila guru yang bersangkutan secara entropi kurang memiliki keinginan untuk berubah dan melakukan perubahan

Upaya lain yang dilakukan pemerintah selain diadakannya penyetaraan guru-guru adalah program sertifikasi, kegiatan dalam PKG (Pusat Kegiatan Guru), kegiatan dalam KKG (Kelompok Kerja Guru) di Gugus Sekolah. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan profesionalisme guru. Pada kegiatan tersebut mereka dapat berbagi pengalaman dan memecahkan masalah yang dihadapi dalam proses belajar mengajar (Supriadi, 1998).

Proses pengembangan profesionalisme guru dilakukan secara terus menerus. Proses tersebut meliputi, pertama pendidikan prajabatan, kedua pendidikan dalam

jabatan termasuk penataran, ketiga pembinaan yang berasal dari organisasi profesi serta tempat kerja, keempat penghargaan masyarakat terhadap profesi, sertifikasi, peningkatan kualitas calon guru, dan imbalan. Secara bersama-sama menentukan pengembangan profesionalisme seseorang guru. Usaha meningkatkan profesionalisme guru merupakan tanggung jawab bersama antara LPTK sebagai penghasil guru, instansi yang membina guru (dalam hal ini Depdiknas atau Yayasan Swasta), PGRI dan masyarakat.

Pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru berupa implementasi kebijakan berkaitan dengan Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen diharapkan akan meningkatkan kinerja sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan guru yang diberlakukan pemerintah untuk melindungi jabatan guru. Program sergu (sertifikasi guru) adalah kegiatan pemberian sertifikasi pendidik bagi tenaga kependidikan. Dengan program ini guru diberikan sertifikat guru profesional bagi yang telah lulus uji sertifikasi melalui program sertifikasi guru (sergu).

Program sertifikasi guru adalah proses perolehan sertifikat pendidik bagi guru. Sertifikat pendidik yang diperoleh guru berlaku sepanjang yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sertifikat diperoleh melalui pendidikan profesi yang diakhiri dengan uji kompetensi. Kompetensi yang dikuasai oleh guru meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.

Peranan guru semakin penting dalam era global. Hanya melalui bimbingan guru yang profesional, setiap siswa dapat menjadi sumberdaya manusia yang berkualitas,

kompetitif dan produktif sebagai asset nasional dalam menghadapi persaingan yang makin ketat dan berat sekarang dan di masa datang (Syadiah, 2012).

Murphy (1998) menyatakan bahwa keberhasilan sekolah sangat ditentukan oleh gurunya, karena guru adalah pemimpin pembelajaran, fasilitator, dan sekaligus merupakan pusat inisiatif pembelajaran. Guru senantiasa mengembangkan diri secara mandiri serta tidak tergantung pada inisiatif kepala sekolah dan supervisor.

Solikin (2010) mengemukakan salah satu temuan penelitiannya bahwa terdapat hubungan yang signifikan ($r=0,164$) antara sertifikasi guru dan kinerja guru. Hubungan antara kinerja guru dan prestasi belajar siswa juga memiliki hubungan yang signifikan ($r=0,279$). Kesimpulan penelitian yang dilakukan oleh Solikin (2010) menunjukkan bahwa sertifikasi guru memberikan dampak yang positif terhadap kinerja guru.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pemberian sertifikat pendidik kepada guru tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kinerja guru. Solikin (2010) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa hubungan antara sertifikasi guru dan kinerja guru sangat rendah. Demikian pula penelitian Hariri (2010) tentang Dampak Sertifikasi Terhadap Kinerja Guru di Jawa Barat, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sertifikasi memiliki pengaruh yang rendah terhadap kinerja guru.

Sykes (1999), mengemukakan bahwa di USA, besarnya populasi sekolah telah menyebabkan adanya kesulitan ketika menarik tenaga kerja yang bermutu ke dalam profesi mengajar, dan karena jumlah kebutuhan guru yang besar, juga kesulitan lain muncul yaitu kemampuan dalam memberikan gaji yang layak yang

menjadi tantangan kuantitas dan kualitas guru secara nasional yang sangat besar yang menyebabkan Negara bagian melonggarkan sebagian besar persyaratan untuk memasuki profesi mengajar, hal tersebut merupakan pendapat yang dikemukakan,

Berdasarkan temuan-temuan penelitian di atas, maka perlu dikaji lebih lanjut secara terperinci dan mendalam mengenai kinerja guru, khususnya pasca sertifikasi. Terutama setelah para guru yang telah tersertifikasi memperoleh insentif TPP (Tunjangan Profesi Pendidik) secara rutin setiap bulannya. Pemetaan dan kajian terhadap situasi dan permasalahan pokok yang melanda dunia pendidikan. Depdiknas merumuskan Renstra Pendidikan yang salah satunya adalah peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, dalam hal ini yang paling utama adalah peningkatan kualitas guru. Kelebihan daya kompetitif dari suatu sumber daya manusia dipengaruhi oleh kualitasnya secara otomatis, melainkan harus ditingkatkan melalui lembaga pendidikan. Jumlah penduduk Indonesia yang besar merupakan modal dasar dalam pembangunan sumber daya manusia, tetapi apabila tidak diikuti dengan peningkatan kualitasnya, maka kuantitas tadi akan menjadi beban pemerintah.

Pelaksanaan sertifikasi guru yang telah berjalan selama ini dinilai belum terlaksana secara utuh. Harapan pemerintah adalah mensejahterahkan guru, meningkatkan kompetensi serta meningkatkan pendidikan yang berkualitas. Pada umumnya mayoritas guru hanya bertujuan memperoleh tambahan penghasilan dengan sertifikasi yang diperoleh. Lebih lanjut dikemukakan oleh Sumarna (dalam Bunyamin, 2011), agar tujuan pemerintah dalam meningkatkan kompetensi serta pendidikan berkualitas tercapai pasca sertifikasi, maka ada tiga hal yang perlu

dilakukan, yaitu: (1) penilaian terhadap kinerja guru yang sudah mengikuti dan lulus sertifikasi, (2) peningkatan kompetensi secara berkelanjutan, (3) memberdayakan kelompok kerja guru (KKG) dan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP). Selanjutnya dengan memanfaatkan teknologi yang berkembang sekarang, penilaian kinerja terhadap guru yang berkaitan dengan kompetensi paedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial dan kepribadian, bisa dilakukan dan langsung diketahui peningkatan kinerjanya pasca sertifikasi.

Kaitannya dengan pelaksanaan sertifikasi guru, menurut Casmudi (2010) bahwa pada kenyataannya guru yang telah mengikuti sertifikasi dengan yang belum tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam menjalankan tugas keprofesionalannya, sehingga banyak kalangan, program sertifikasi dipandang hanya sebagai cara mensejahterahkan guru yang selama ini hajat kehidupan kesejahteraannya terganggu, sehingga timbul sebutan-sebutan miring seperti kaum Umar Bakri.

Penelitian tentang sertifikasi telah banyak dilakukan. Penelitian tersebut tertarik untuk mengkaji tentang dampak dari sertifikasi guru. Salah satunya adalah Muhammad Muhadjir (2011) dalam penelitiannya tentang hubungan antara keefektifan program sertifikasi guru, kualifikasi profesional, semangat Kerja, dan budaya mutu dengan kinerja guru Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Jember. Dalam penelitian tersebut bertujuan untuk menunjukkan efektif tidaknya program sertifikasi tenaga kependidikan, kompetensi profesional, semangat kerja, budaya mutu dan etos kerja guru pada SD di Kabupaten Jember, juga untuk mengidentifikasi hubungan antara setiap variabel tersebut, baik secara langsung maupun tidak

langsung, dengan pendekatan kuantitatif dan rancangan penelitian *survey*. Setelah dilakukan pengumpulan data dan dianalisis penelitian tersebut memperoleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa adanya hubungan antara keefektifan program sertifikasi, kualitas profesional guru, semangat kerja guru, budaya mutu, serta kinerja guru sekolah dasar negeri di Kabupaten Jember berada pada kategori tinggi. Hasil analisis hubungan antar variabel diketahui bahwa terdapat hubungan yang signifikan secara simultan antara keefektifan sertifikasi guru, kompetensi profesional guru, semangat kerja guru, dan budaya mutu dengan kinerja guru di SD Negeri di Kabupaten Jember.

Sebagian besar guru sudah mengikuti sertifikasi, tetapi hal tersebut tidak diiringi dengan sikap profesional. Sikap profesional sangat dibutuhkan dalam kegiatan belajar mengajar, tetapi masih ditemukan sikap yang belum menunjukkan keprofesionalan guru. Sikap tersebut antara lain melaksanakan pembelajaran di kelas tanpa persiapan perencanaan pembelajaran (RPP), penggunaan metode kurang tepat, jam pembelajaran kurang efektif yaitu pukul 12.30 sekolah sudah tutup. Hal tersebut menjadi suatu permasalahan yang ada di lapangan.

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti menganggap tentang pentingnya dilakukan penelitian ilmiah tentang makna profesionalisme kependidikan bagi guru. Kaitannya dengan hal tersebut, yang paling mendekati kebenaran adalah dengan menggunakan paradigma integratif. Menurut Ritzer, oleh karena sulitnya untuk mengetahui gejala-gejala sosial yang bervariasi dan saling memberikan pengaruh, diperlukan paradigma integratif. Dalam memahami fenomena tersebut diperlukan kemampuan menguraikan serta menjelaskan empat tingkatan yang mendasar dari

mengkaji aspek sosial dalam satu komunitas, yaitu makro-subjektif misalnya value, dalam skala makro misalnya dalam struktur pemerintahan, juga adanya model interaksi di komunitas sosial.

Paradigma fakta sosial menurut Ritzer yakni memfokuskan perhatian pada jenjang mikro-subjektif dan makro-subjektif. Dalam rumusan sosial, memfokuskan pengamatan yang utama dalam komunitas skala mikro yang subjektif dan obyektif yang memiliki ketergantungan dalam proses sikap (tindakan). Sementara itu, pada ranah perilaku sosial memusatkan pengamatan pada komunitas skala mikro yang belum mengikutkan proses berpikir dan bertindak. Dari ketiga cara pandang terdapat persimpangan terhadap kenyataan sosial secara horizontal, bersimpangan dengan kajian integratif yang vertikal dan kajian integratif tidak akan dapat menggantikan kajian yang lain. Walaupun setiap dari tiga kajian tersebut menjelaskan satu strata fakta sosial tertentu. Cara pandang integratif juga menjelaskan semua tingkat, tetapi tidak meneliti tingkatan tertentu secara rinci seperti yang dilakukan oleh paradigma lain. Cara pandang yang dipilih tergantung dari jenis pertanyaan yang diajukan, menurut Ritzer (2008) bahwa tidak seluruhnya masalah sosiologi membutuhkan pendekatan integratif, meskipun ada juga yang membutuhkan.

Sertifikasi guru merupakan kebijakan yang diluncurkan oleh pemerintah pada dunia pendidikan. Sertifikasi guru adalah proses perolehan sertifikat pendidik bagi guru. Sertifikat pendidik yang diperoleh guru berlaku sepanjang yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sertifikat pendidik ditandai dengan satu nomor registrasi guru yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional.

Sertifikat diperoleh melalui pendidikan profesi yang diakhiri dengan uji kompetensi. Kompetensi yang harus dikuasai oleh guru meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.

Guru yang profesional harus mengacu pada standar profesi. Standar profesi adalah prosedur dan norma-norma dan prinsip-prinsip yang dipergunakan sebagai pedoman agar keluaran kuantitas dan kualitas pelaksanaan profesi tinggi, sehingga kebutuhan orang dan masyarakat ketika diperlukan dapat dipenuhi. Teori tentang guru profesional dikemukakan oleh Rice & Bishoprick (1971) menyatakan bahwa guru yang profesional adalah guru yang mampu mengelola dirinya sendiri dalam melaksanakan tugas-tugasnya sehari-hari, sementara itu Glickman (1981) menyatakan bahwa guru yang profesional adalah bilamana yang bersangkutan memiliki kemampuan (*ability*) yang tinggi dan semangat kerja yang tinggi pula.

Sedangkan dunia kependidikan menuntut guru yang profesional. Diharapkan guru yang telah mengikuti program sertifikasi dan memperoleh TPP lebih profesional. Sementara itu, berdasarkan studi pendahuluan di Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, belum seluruhnya guru yang memperoleh TPP secara signifikan meningkat profesionalismenya. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui lebih lanjut seberapa besar dampak sertifikasi guru terhadap para guru yang tersertifikasi di Singosari Kabupaten Malang.

Berdasarkan kajian teoritik dan empirik di atas, profesionalisme menentukan kinerja guru. Dalam penelitian ini akan mengkaji makna profesionalisme kependidikan bagi guru, dengan pokok masalah bagaimana dampak sertifikasi bagi guru.

Berdasarkan hal tersebut peneliti ingin melakukan penelitian tentang makna sertifikasi terhadap peningkatan profesionalisme guru. Untuk itu peneliti mengambil judul “Makna Profesionalisme Kependidikan Bagi Guru (Studi Fenomenologi Dampak Sertifikasi Guru di Kabupaten Malang)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian tentang profesionalisme kependidikan bagi guru penerima sertifikasi di atas, dikemukakan deskripsi masalah penelitian berikut ini:

1. Bagaimana makna profesionalisme kependidikan bagi guru penerima sertifikasi di Kabupaten Malang?
2. Bagaimana makna sertifikasi bagi guru di Kabupaten Malang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengkaji dan menganalisa makna profesionalisme kependidikan bagi guru penerima sertifikasi di Kabupaten Malang.
2. Mengkaji dan menganalisa makna sertifikasi bagi guru di Kabupaten Malang.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat teoritis dan praktis dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini menemukan proposisi tentang makna profesionalisme kependidikan bagi guru penerima sertifikasi.

2. Secara praktis adalah sebagai salah satu alternatif bentuk terobosan rujukan baru bagi semua pihak, baik untuk pemerintah, guru, masyarakat pemakai jasa guru, maupun pihak lain yang terkait dengan profesionalisme guru.

1.5 Definisi Operasioanal

1.5.1 Konsep makna

Makna adalah arti atau maksud yang tersimpul dari suatu kata. Pengertian makna menurut para ahli bahasa, salah satunya adalah Saussure (Chaer, 2007) mengungkapkan pengertian makna sebagai pengertian atau konsep yang dimiliki atau terdapat pada suatu tanda linguistik. Saussure (1994) mengungkapkan bahwa makna adalah pengertian atau konsep yang dimiliki atau terdapat pada suatu tanda. Shipley berpendapat bahwa, jika seseorang menafsirkan makna sebuah lambang, berarti ia memikirkan sebagaimana mestinya tentang lambang tersebut; yakni suatu keinginan untuk menghasilkan jawaban tertentu dengan kondisi-kondisi tertentu pula (Shipley, 1962).

1.5.2 Konsep Profesionalisme

Profesionalisme adalah kompetensi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar dan juga komitmen dari para anggota dari sebuah profesi untuk meningkatkan kemampuan dari seorang karyawan. Dalam penelitian ini konsep profesionalisme bagi guru di sekolah dasar. Pengertian profesionalisme adalah standard yang dikenakan terhadap suatu pekerjaan yang dilakukan dengan lebih dilandasi oleh keyakinan akan nilai-

nilai kebenaran, kehormatan, kecintaan dan keterpanggilan di dalam pekerjaan itu, baik dalam hal menguasai keahlian yang diperlukan maupun pelayanan atas nama pekerjaan itu kepada orang lain dari pada sekedar atau semata-mata untuk memperoleh bayaran (Effendi, 2009).

1.5.3 Konsep Profesionalisme Kependidikan

Profesionalisme adalah sebutan yang mengacu kepada sikap mental dalam bentuk komitmen dari para anggota suatu profesi untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan profesionalnya (Hosnan, 2014). Profesionalisme kependidikan dapat diartikan profesionalisme tenaga kependidikan.

1.5.4 Sertifikasi

Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen (UURI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen). Sertifikasi dalam penelitian ini adalah program sertifikasi yang diikuti oleh guru untuk memperoleh TPP.

1.5.5 Guru

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah (UURI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen). Sedangkan guru yang dimaksud dalam penelitian ini adalah guru yang bertugas di sekolah dasar dan yang telah mengikuti program sertifikasi guru yang dilaksanakan pemerintah.